

JABM

Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Manajemen

ISSN:0854-4190

Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Politeknik Negeri Malang.

Atika Syuliswati dan Andi Asdani

Pengaruh Tingkat Financial Distress dan Ukuran Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015.

M Soedarman

Studi Keperilakuan Individu dalam Menggunakan Sistem Informasi Berbasis Teknologi.

Tri Rahayu Widyaningrum dan M. Iswahyudi

Analisa Pengaruh Insentif, Upah dan Absensi pada Produktivitas Karyawan Mulia Bordir di Blitar.

Sunarsasi

Peran Elemen Kemasan terhadap Perilaku Pembelian Kopi Instan Sachet.

Lina Budiarti

JABM

VOLUME 24

NOMOR 1

OKTOBER 2017

DAFTAR ISI

Volume 24

No. 1

April 2017

Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Politeknik Negeri Malang. 1-17

Atika Syuliswati dan Andi Asdani

Pengaruh Tingkat *Financial Distress* dan Ukuran Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015. 18-35

M Soedarman

Studi Keperilakuan Individu dalam Menggunakan Sistem Informasi Berbasis Teknologi. 36-50

Tri Rahayu Widyaningrum dan M. Iswahyudi

Analisa Pengaruh Insentif, Upah dan Absensi pada Produktivitas Karyawan Mulia Bordir di Blitar. 51-58

Sunarsasi

Peran Elemen Kemasan terhadap Perilaku Pembelian Kopi Instan Sachet. 59 - 67

Lina Budiarti

Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Politeknik Negeri Malang

Atika Syuliswati dan Andi Asdani

Dosen Akuntansi, Politeknik Negeri Malang

E-mail: atikasyuliswati@gmail.com

Abstracts:

This study aims to give empirical evidence of the application performance-based budgeting affect to performance accountability at State Polytechnic Of Malang, to see the effect of the application of performance-based budgeting to performance accountability using four variables namely, budgeting planning, budgeting implementation, budgeting reporting, and budgeting evaluation. In this study population taken were 49 people, they are director, deputy director, head of department, secretary of department, head of study program, head of technical unit and there are whole sample. Data collected through direct observation and surveys obtained by the division of questionnaires to the respondents. Multiple linear regression formula is used in this study with software SPSS 20.0. The results of this research proves that simultaneously budgeting planning, budgeting implementation, budgeting reporting, and budgeting evaluation have a significant and positive effect to performance accountability. Partially budgeting planning and budgeting reporting have significant and positive effect to performance accountability.

Keywords: *Performance based budgeting, Budgeting planning, Budgeting implementation, Budgeting reporting, Budgeting evaluation*

PENDAHULUAN

Sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja institusi pendidikan, diperlukan kewajiban pertanggungjawaban mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan atas tugas dan fungsinya dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk penerapan anggaran berbasis kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting karena dampaknya terhadap akuntabilitas kinerja, sehubungan dengan fungsi instansi pendidikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diperlukan agar optimalisasi dalam pelayanan publik menjadi prioritas utama karena masih ditemui banyak keluhan masyarakat mengenai pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat serta berbagai bentuk pengalokasian anggaran yang

kurang mencerminkan aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran (Mardiasmo, 2005). Salah satu prioritas dalam pelayanan publik adalah bidang pendidikan. Mengingat pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat maka pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar.

Dalam pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penerapan penganggaran berbasis kinerja yang terukur melalui tahapan siklus anggaran, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasinya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan menghubungkan pengeluaran dan hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi input, output dan *outcome* yang dihasilkan oleh suatu program dan kegiatan. Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja. Penerapan Anggaran berbasis kinerja diukur berdasarkan empat variabel sebagai berikut: (1) Perencanaan Anggaran, (2) Pelaksanaan Anggaran, (3) Pelaporan Anggaran, dan (4) Evaluasi Anggaran. Dimana keempat variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Perencanaan merupakan dasar bagi penerapan anggaran berbasis kinerja. Indikator-indikator kinerja dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan informasi kinerja yang diinginkan oleh organisasi. Informasi kinerja yang terdapat dalam perencanaan kinerja merupakan dasar alokasi anggaran berbasis kinerja. Manfaat perencanaan adalah sebagai berikut: (1) Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci; (2) Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program; (3) Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja; (4) Membantu dalam menetapkan target kinerja; dan (5) Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja.

Selama tahap pelaksanaan anggaran, pimpinan instansi bertanggungjawab untuk memonitor pelaksanaan kegiatan, dan bagian akuntansi melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran (input) dan outputnya dalam sistem akuntansi keuangan. Di instansi pemerintah, laporan kinerja yang disusun berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Instansi Pemerintah atau yang biasa dikenal dengan nama lakip. Lakip merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagaimana instruksi Presiden.

Evaluasi anggaran adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisa dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien suatu kegiatan dan sasaran yang

dicapai. Evaluasi anggaran yang baik perlu dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) Membandingkan rencana dan realisasi; (2) Membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu; (3) Membandingkan dengan organisasi lain (*benchmarking*); dan (4) Membandingkan realisasi dengan standarnya. Hasil evaluasi dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan kegagalan program serta kegiatan pada suatu unit kerja atau organisasi. Proses anggaran merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi apakah pemerintah melakukan tugasnya secara ekonomis, efektif dan efisien.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Melihat berbagai permasalahan yang diuraikan diatas, dan perbedaan dari beberapa hasil penelitian, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Pada tahun 2012, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 58/KMK.05/2012, POLINEMA secara resmi berstatus sebagai BLU penuh. Sistem anggaran dalam PPK BLU mensyaratkan Satuan Kerja (Satker) BLU untuk menyusun dokumen anggaran Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). RBA merupakan bagian dari Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL) BLU. Beberapa peraturan utama yang secara khusus mengaturnya yaitu: (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (5) PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, (6) PMK No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, dan (7) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi (Bastian, 2010). Penganggaran berbasis kinerja mengalokasikan sumber daya ke program bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output (*output measurement*) sebagai indikator kinerja organisasi. Pemerintah Indonesia telah

mencanangkan reformasi di bidang keuangan negara. Mardiasmo (2005) menyebutkan bahwa reformasi di bidang keuangan negara meliputi lima bidang yaitu reformasi sistem pembiayaan, reformasi sistem penganggaran, reformasi sistem akuntansi, reformasi sistem pemeriksaan, dan reformasi sistem manajemen keuangan daerah.

Salah satu wujud reformasi sistem penganggaran (*budgeting reform*) adalah penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1949, namun dalam praktiknya mengalami kegagalan (Schiavo Campo dan Tommasi dalam Bastian, 2010). Pada reformasi anggaran yang dilakukan pada tahun 1990-an, beberapa karakteristik penting dari penganggaran berbasis kinerja masih dianggap sangat bermanfaat, dan kemudian dikembangkan bersama dalam konteks reformasi administrasi publik.

Anggaran berbasis kinerja berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan anggaran ini selain berdasarkan apa yang dibelanjakan, juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atau rencana-rencana tertentu, dan untuk pelaksanaannya perlu didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien. Sehingga dalam sistem anggaran berbasis kinerja ini bukan semata-mata berorientasi kepada berapa jumlah yang dikeluarkan, tetapi sudah dipikirkan terlebih dahulu mengenai rencana kegiatan, apa yang akan dicapai, proyek apa yang akan dikerjakan, dan bagaimana pengalokasian biaya agar digunakan secara efektif dan efisien.

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi (Bastian, 2010). Anggaran berbasis kinerja mengalokasikan sumber daya ke program bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output (*output measurement*) sebagai indikator kinerja organisasi. Lebih jauh, pengkaitan biaya dengan output organisasi merupakan bagian integral dalam berkas anggarannya. Dengan kata lain, Anggaran berbasis kinerja adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan biaya unit (*unit cost*) dari setiap kegiatan yang terstruktur. Struktur disini diawali dengan pencapaian tujuan, program, dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen. Penyusunan anggaran menjamin tingkat keberhasilan program, oleh karena itu anggaran dianggap sebagai pencerminan program kerja.

Anggaran berbasis kinerja memberikan fokus pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi, dimana setiap kegiatan yang ada tersebut harus dapat diukur kinerjanya. Definisi lain pada Modul *Overview* Keuangan Negara oleh Departemen Keuangan (2008), anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Capaian hasil tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Bagaimana cara agar tujuan itu dapat dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan/pendanaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja *output*. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Haryanto, 2007). Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas, baik aktivitas langsung maupun tidak langsung yang mendukung program sekaligus melakukan estimasi biaya-biaya berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas tersebut. Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan. Dengan kata lain, integrasi dari rencana kinerja tahunan (Renja) yang merupakan rencana operasional dari Renstra dan anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja. Elemen – elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah: Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya; Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya; Implementasi anggaran berbasis kinerja, menyangkut dokumen anggaran, baik perencanaan maupun pelaksanaan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diatas maka tujuan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja berdasarkan Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (2009) diharapkan: (1) Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kerja yang akan dicapai (*directly linkages between performance and budget*), (2) Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (*operational efficiency*), (3) Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

Kerangka Kerja Anggaran Berbasis Kinerja

Sistem penganggaran berbasis kinerja memiliki suatu kerangka kerja yang secara sistematis dibangun untuk menghasilkan suatu anggaran berbasis

kinerja. Secara umum kerangka kinerja pada sistem anggaran berbasis kinerja menurut Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP (2005) yang menjelaskan bahwa pada dasarnya penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri. Rencana strategis yang dituangkan dalam target tahunan pada akhirnya selalu dievaluasi dan diperbaiki terus menerus. Proses perencanaan anggaran diawali dengan penyusunan rencana strategis organisasi. Berdasarkan rencana strategis yang sudah ditetapkan tersebut setiap tahunnya dituangkan dalam suatu rencana kinerja tahunan.

Berdasarkan pada rencana kinerja tersebut, instansi menyusun rencana anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan hasil-hasil (*outcome*) yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Anggaran yang disusun adalah anggaran dengan pendekatan kinerja karena dalam anggaran ini dapat merefleksikan hubungan antara aspek keuangan dari seluruh kegiatan dengan sasaran strategis maupun rencana kinerja tahunannya.

Rencana anggaran tahunan diajukan kepada legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan maka terbitlah rencana anggaran tahunan yang disetujui oleh legislatif. Berdasarkan rencana anggaran tahunan yang telah disetujui masing – masing instansi menyusun rencana operasional tahunan. Berdasarkan pada rencana kinerja tahunan, rencana anggaran tahunan yang telah disetujui dan rencana operasional tahunan, disusunlah kesepakatan kinerja. Dokumen kesepakatan antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif yaitu dokumen kontrak kinerja.

Akhir tahun anggaran, setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, manajemen kinerja melakukan review, evaluasi dan penilaian atas hasil yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja yang ada dalam kesepakatan kinerja dilaporkan ke dalam suatu laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja meliputi laporan kinerja keuangan dan dan laporan kinerja non-keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya.

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut

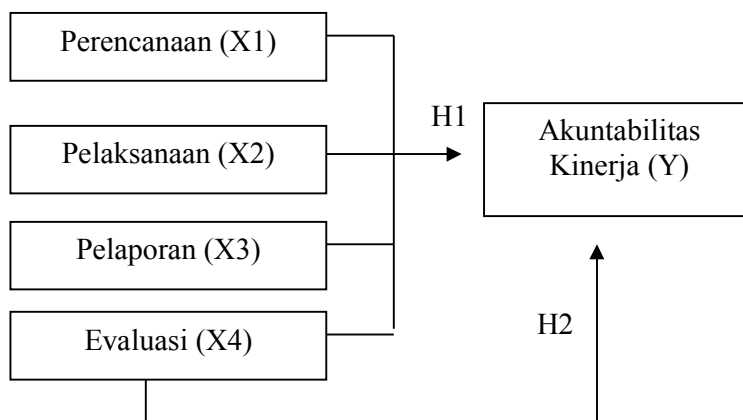
pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Akuntabilitas berarti suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundangundangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan; dan Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; Serta Adanya output dan outcome yang terukur.

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan landasan teori, masalah penelitian dan penelitian terdahulu, maka penulis mengembangkan model hipotesis sebagai berikut:



Sumber: BPKP (2005)

Gambar 1. Model Hipotesis

Berdasarkan model tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja.

H₂ : Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai *hypothesis testing*. Menurut Sekaran (2003) *hypothesis testing* merupakan suatu penelitian yang sudah memiliki kejelasan gambaran, pengujian hipotesis dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian.

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Politeknik Negeri Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah *observasional* dengan menggunakan desain *cross sectional study*.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari direktur (1 orang), wakil direktur (4 orang), ketua jurusan (7 orang), sekretaris jurusan (7 orang), ketua program studi (18 orang), dan ketua UPT (12 orang). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 49 orang yang kesemuanya menjadi sampel (sampel jenuh).

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala likert.

Model Analisis Data

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Regresi Linear Multipel (*Multiple Linear Regression Analysis*) yang digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Model analisis regresi linier multipel dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi. Penelitian diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, statistik deskriptif, dan uji statistik untuk pengujian hipotesis.

Uji Kualitas Data

Ada dua konsep mengukur kualitas data yaitu reliabilitas dan validitas. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor *konstruk*. Hasil analisis korelasi *bivariate* dengan melihat output *Pearson Correlation* (Ghozali, 2005). Dengan kriteria jika nilai sig. pada total skor konstruk $< 0,05$ item pertanyaan/pernyataan dikatakan valid.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Uji reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai *cronbach.s alpha*. Jika nilai *cronbach.s alpha* lebih besar dari 0,60 maka butir-butir pertanyaan/pernyataan pada masing-masing variabel penelitian tersebut dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji Chi Square, Skewness, dan Kurtosis atau uji Kolmogorof Smirnov (Ghozali, 2013). Dalam uji normalitas ini penulis memilih menggunakan uji Kolmogorov Smirnov.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat pada tolerance value atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila *tolerance value* dibawah 1 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinearitas. Apabila ternyata terdapat multikolinearitas, maka salah satu variabel harus dikeluarkan dari persamaan (Ghozali, 2013).

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *varians* dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Dan jika *varians* berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model yang baik adalah model regresi yang bebas autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Dengan kriteria pengujian jika probabilitas $> 0,05$ maka H_1 ditolak ; Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_1 diterima

Pengujian Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2011). Dengan kriteria pengujian jika probabilitas $> 0,05$ maka H_2 ditolak ; Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_2 diterima

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi anggaran dan satu variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja. Definisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi anggaran serta akuntabilitas kinerja (BPKP, 2005) diuraikan sebagai berikut:

Perencanaan anggaran (X1) adalah tahap estimasi pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan yang harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah dirumuskan dalam renstra organisasi. Selama tahap pelaksanaan anggaran (X2), pimpinan instansi bertanggungjawab untuk memonitor pelaksanaan kegiatan, dan bagian akuntansi melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran (*input*) dan *outputnya* dalam sistem akuntansi keuangan. Pelaporan anggaran (X3) dalam hal ini mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan beserta pencapaian hasil kerja atau kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.

Evaluasi anggaran (X4) dilakukan atas laporan kinerja, pimpinan bisa melakukan evaluasi sehingga bisa mengetahui dan menganalisis upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, manakala terjadi penyimpangan atau hambatan dalam implementasi anggaran, maka pimpinan bisa mengambil langkah atau kebijakan untuk mengatasi penyimpangan atau hambatan tersebut. Akuntabilitas kinerja (Y) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

HASIL PENELITIAN

Uji Kualitas Data

Pengujian validitas instrumen dengan bantuan perangkat lunak SPSS, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika nilai *pearson correlation* yang diperoleh lebih besar daripada angka kritik (r hitung $>$ r tabel) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Angka kritik pada penelitian ini adalah $N-2 = 30-2 = 28$ dengan taraf signifikan 5% atau $df = (\alpha, n-2)$ maka angka kritik untuk uji validitas pada penelitian ini adalah 0,374. Berdasarkan pengujian validitas instrumen, nilai *Corrected Item-Total Correlation* bernilai positif dan di atas nilai r tabel (0,374) yang artinya semua butir pertanyaan dapat dikatakan valid.

Untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut telah reliabel, maka dilakukanlah pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan komputer program SPSS. Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya. Secara umum suatu instrumen dikatakan bagus jika memiliki koefisien Cronbach's alpha sebesar $>$ 0,6. Nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel akuntabilitas kinerja (Y), perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), pelaporan anggaran (X3) dan evaluasi anggaran (X4) lebih besar dari 0,6 (*Cronbach's Alpha* $>$ 0,6), maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut reliabel.

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Data yang digunakan berdistribusi normal. Dalam model regresi tidak ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen atau tidak terjadi multikolinearitas. Dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. dan bebas autokorelasi.

Pengaruh Secara Simultan dan Parsial

Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dianalisis dengan menggunakan uji F, yaitu dengan memperhatikan signifikansi nilai F pada output perhitungan dengan tingkat alpha 5%. Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5% maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Pada hasil uji regresi dalam penelitian ini, diketahui nilai uji F sebesar 22.628 dengan signifikansi 0,000. Dimana disyaratkan nilai signifikansi F lebih kecil dari 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja (Y). Hal tersebut berarti jika perencanaan anggaran

(X₁), pelaksanaan anggaran (X₂), pelaporan anggaran (X₃), evaluasi anggaran (X₄) secara bersama sama mengalami peningkatan maka akan berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja (Y), begitu juga sebaliknya.

Nilai t hitung dari hasil regresi tersebut untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan tingkat kepercayaan 95% atau pada alpha 5%. Dengan syarat apabila nilai variabel independen signifikan terhadap variabel dependen maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan apabila tidak signifikan maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini uji t digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak dengan mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Adapun metode dalam penentuan t tabel menggunakan ketentuan tingkat signifikansi 5%, dengan $df=n-k-1$ (pada penelitian ini $df=49-5-1=43$), sehingga didapat nilai t tabel sebesar 0,297. Dari nilai tersebut yang kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel. Sehingga didapatkan hasil variabel Perencanaan anggaran (X₁) dan Pelaporan anggaran (X₅) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y). Variabel Pelaksanaan anggaran (X₂), Evaluasi anggaran (X₄) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja (Y).

Persamaan Regresi

Untuk mempermudah pembacaan hasil dan interpretasi analisis regresi maka digunakan bentuk persamaan. Persamaan atau model tersebut berisi konstanta dan koefisien-koefisien regresi yang didapat dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. Persamaan regresi yang telah dirumuskan kemudian dengan bantuan program SPSS dilakukan pengolahan data sehingga didapat persamaan akhir sebagai berikut:

$$Y = 11,183 + 0,259\beta_1 + 1,672\beta_2 + 0,960\beta_3 + 1,070\beta_4$$

Koefisien Determinasi (R²)

Besarnya koefisien determinasi (R²) sebesar 67%. Sehingga dapat dikatakan bahwa 67,3% variasi variabel dependen dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu variabel perencanaan anggaran (X₁), pelaksanaan anggaran (X₂), Politeknik Negeri Malang perlu meningkatkan perencanaan anggaran dalam program atau kegiatan terkait pencapaian visi dan misi.

Dalam pelaksanaan anggaran Politeknik Negeri Malang sebaiknya lebih memonitoring pelaksanaan program/kegiatan dan seberapa jauh pelaksanaannya serta terus memperbaiki sistem akuntansi keuangan dalam hal pencatatan penggunaan anggaran.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Ciri utama *Performance Based Budgeting* adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*input*) dan hasil yang diharapkan (*outcomes*), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan. Pada pengujian hipotesis berdasarkan hasil perhitungan dapat dikatakan bahwa perencanaan dan pelaporan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja baik secara simultan maupun parsial telah terbukti, sedangkan pelaksanaan dan evaluasi anggaran tidak signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa semakin baik perencanaan dan pelaporan anggaran tentunya memberikan kontribusi yang baik terhadap akuntabilitas kinerja.

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika perencanaan anggaran yang dilakukan semakin baik, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan perencanaan anggaran yang baik karena perencanaan merupakan pondasi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi atau instansi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muda (2005) dengan judul Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja merupakan dasar bagi penerapan anggaran berbasis kinerja. Indikator-indikator kinerja dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan informasi kinerja yang diinginkan oleh organisasi. Informasi kinerja yang terdapat dalam perencanaan kinerja merupakan dasar alokasi anggaran berbasis kinerja. Dalam sistem Penganggaran Berbasis Kinerja ini, manfaat perencanaan kinerja adalah sebagai berikut: (a) Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci; (b) Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program; (c) Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja; (d) Membantu dalam menetapkan target kinerja; (e) Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pada tahun 2013, POLINEMA memperoleh pendanaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L), selama ini untuk program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana PNBP terlihat sangat terinci per aktifitas kegiatannya. Program dan kegiatan yang tertulis dalam RKAKL ini akan terkontrol pelaksanaannya karena RKAKL ini terkait dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan sistem pembayaran melalui mekanisme Surat Perintah membayar (SPM) di KPPN. Hal ini berbeda untuk program dan kegiatan yang dibiayai dari dana PNBP. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana PNBP hanya tertulis rekap akunnya saja. Program dan kegiatan yang bersumber dari dana PNBP ini sangat besar. Dengan dana yang besar dan kegiatan yang sangat banyak akan mengalami kesulitan di tingkat Kementerian/Lembaga kalau di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga harus dirinci secara detail. Selama ini, Jurusan/Unit yang ada di POLINEMA sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan anggaran sehingga dana bisa dicairkan dengan ketentuan akun/mata anggaran yang bersangkutan.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika implementasi anggaran yang dilakukan semakin baik, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, akan tetapi tidak terjadi pengaruh yang signifikan antara implementasi/pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena kemungkinan variabel pelaksanaan/implementasi anggaran dipengaruhi oleh variabel perencanaan anggaran.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muda (2005) dengan judul Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Pelaporan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika pelaporan/pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan semakin baik, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran.

Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dilakukan untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika pelaporan/pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan semakin baik, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akan tetapi pengaruhnya tidak berdampak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena kemungkinan variabel evaluasi kinerja dipengaruhi oleh variabel pelaporan/pertanggungjawaban anggaran.

Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisa dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien suatu kegiatan dan sasaran yang dicapai. Untuk bisa mengukur seberapa efektif suatu program dan kegiatan terlebih dahulu harus mendefinisikan *outcome* (hasil) dari program yang ingin dicapai. Langkah selanjutnya yaitu mengukur kinerja program yang berkaitan dengan pencapaian hasil yang diinginkan serta melaporkan hasil kepada para pengambil keputusan berdasarkan informasi yang diberikan. Pengukuran kinerja ini untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja.

Untuk dapat dilakukan pengukuran yang baik, indikator kinerja harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) Merupakan ukuran/indikator suatu parameter yang bisa dicek. (b) Merupakan nilai *outcome* atau paling tidak merupakan nilai output. (c) Menggunakan nilai kuantitatif lebih diutamakan, kalau tidak bisa baru menggunakan nilai kualitatif. (d) Menunjukkan kesetaraan, keseimbangan dan keserasian hubungan antar visi, misi, tujuan, sasaran dan aktivitas dari instansi. Mengenai pengukuran kinerja ini juga dilakukan telaah dokumen. Dokumen yang ditelaah yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lakip). Laporan kinerja yang diamati yaitu lakip tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Evaluasi kinerja yang baik perlu dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a) Membandingkan rencana dan realisasi; (b) Membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu; (c) Membandingkan dengan organisasi lain (*benchmarking*); (d) Membandingkan realisasi dengan standarnya. Hasil evaluasi kinerja dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan

kegagalan program serta kegiatan pada suatu unit kerja atau organisasi. Proses anggaran merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi apakah pemerintah melakukan tugasnya secara ekonomis, efektif dan efisien.

POLINEMA memang telah membentuk SPI (Satuan Pengawasan Internal). Robinson (2002) menyebutkan prakondisi yang harus dimiliki untuk memberhasilkan implementasi *performance based budgeting* yaitu: (1) Sistem informasi kinerja yg baik; (2) Penyusunan indikator kinerja yg baik; (3) Sistem akuntansi manajemen yg baik; dan (4) Evaluasi dan alat analisis.

Di instansi pemerintah, laporan kinerja yang disusun berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Instansi Pemerintah atau yang biasa dikenal dengan nama lakip. Lakip merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagaimana instruksi presiden melalui inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang kemudian dipertegas kembali melalui keputusan LAN nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah. POLINEMA sudah membuat laporan kinerja yang berupa lakip. Laporan kinerja ini dibuat oleh masing-masing unit kerja dan dikompilasi di tingkat pusat oleh Bagian Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi. Akan tetapi yang terjadi selama ini belum mengevaluasi lakip yang sudah disusun atas capaian kerjanya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) Secara simultan faktor perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja; dan (2) Secara parsial faktor perencanaan dan pelaporan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, namun pelaksanaan dan evaluasi anggaran tidak signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, akan tetapi semua variabel independen mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.

Saran

Untuk penyempurnaan penyusunan anggaran berbasis kinerja disampaikan beberapa saran yaitu: (1) Politeknik Negeri Malang perlu meningkatkan perencanaan anggaran dalam program atau kegiatan terkait pencapaian visi dan misi, dan (2) Dalam pelaksanaan anggaran Politeknik Negeri Malang sebaiknya lebih memonitoring pelaksanaan program/kegiatan dan seberapa jauh pelaksanaannya serta terus memperbaiki sistem akuntansi keuangan dalam hal pencatatan penggunaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2003, Undang -Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Anonimous, 2003, SK LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Anonimous, 2004, Undang - Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Anonimous, 2004, Undang-undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Anonimous, 2004, UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Anonimous, 2004, Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- Anonimous, 2004, Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga(RKAKL).
- Anonimous, 2008, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 102/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga(RKA-KL) serta Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2007, Bahan Diklat Sistem Administrasi Keuangan Negara.
- Bastian, 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Erlangga.
- DEPUTI IV BPKP, 2005, *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*, Jakarta: BPKP.
- Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo, 2005, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Muda, 2005, *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan*, Disertasi, UNPAD, Jawa Barat.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sekaran, Umar, 2003, *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*, USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Widyantoro, Ari Eko, 2009, *Implementasi Performance Based Budgeting: Sebuah Kajian Fenomologis*, Tesis, Semarang: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.